

LOCAL GENIUS DALAM KEPEMIMPINAN NASIONAL

Efrizal Nasution

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, Indonesia

nasutionefrizal@gmail.com

Article Info

Article history:

Received: 21th December 2025

Accepted: 25th January 2026

Published: 1st March 2026

Page: 21-41

Keyword:

Local genius, Kearifan Lokal, Kepemimpinan nasional, Budaya Indonesia

Corresponding Author

Efrizal Nasution

Abstract

Local genius is understood as the local cultural values that are alive within a community and serve as a source of legitimacy, policy direction, and national leadership style. This study examines the role of local genius in Indonesia's national leadership practices during three significant periods: the Soekarno era, the Soeharto era, and the post-Reform democratic era. The purpose of this study is to analyze how these values have been integrated, modified, or even diminished in the dynamics of Indonesian politics over time. The method used was a literature review employing a qualitative historical approach. Research findings indicate that during the Soekarno era, local genius manifested itself in a spirit of mutual cooperation and revolutionary nationalism, which were integrated into the concept of national unity and nation-building through guided democracy. During the Suharto era, local ingenuity was institutionalized through political stability and economic development, with an emphasis on social harmony and a culture of compliance. Meanwhile, during the Reform era, local genius became fragmented but continued to manifest itself in the form of decentralization, the strengthening of local wisdom, and community participation in democracy.

Abstrak

Local genius dipahami sebagai nilai-nilai budaya lokal yang hidup dalam masyarakat dan menjadi sumber legitimasi, orientasi kebijakan, serta gaya kepemimpinan nasional. Penelitian ini membahas peran *local genius* dalam praktik kepemimpinan nasional Indonesia pada tiga periode penting, yaitu era Soekarno, era Soeharto, dan era demokratis pasca Reformasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai tersebut diintegrasikan, dimodifikasi, atau bahkan direduksi dalam dinamika politik Indonesia dari masa ke masa. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan historis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada era Soekarno, *local genius* tampil dalam semangat gotong royong dan nasionalisme revolusioner yang terintegrasi dalam konsep untuk persatuan dan membangun bangsa dengan membuat demokrasi terpimpin. Pada era Soeharto, *local genius* lebih diformalisasi melalui stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, dengan penekanan pada harmoni sosial dan budaya kepatuhan. Sementara itu, pada era Reformasi, *local genius* mengalami fragmentasi namun tetap muncul dalam bentuk desentralisasi, penguatan kearifan lokal, serta partisipasi masyarakat dalam demokrasi.

Copyright © 2026 The authors. JMEC is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0. International License

Pendahuluan

Pemimpin nasional merupakan figur yang sangat menentukan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Eksistensi pemimpin sering menjadi suatu polemik tersendiri manakala sistem memiliki banyak kelemahan dan tentunya menyebabkan seorang pemimpin menjadi sangat penting. Peran seorang pemimpin mempunyai fungsi untuk menjalankan perencanaan, aktifitas dan pengawasan. Seorang pemimpin juga membutuhkan kontrol, karena kalau tidak ada kontrol maka akan menimbulkan terjadinya kecendrungan yang berdampak pada perubahan struktur sosial masyarakat sesuai dengan karakteristik pemimpin tersebut.

Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki keragaman budaya, adat istiadat, bahasa, dan sistem nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Keragaman tersebut melahirkan berbagai bentuk *local genius* atau kearifan lokal yang menjadi pedoman dalam mengatur hubungan sosial, politik, dan budaya. Dalam konteks kepemimpinan nasional, *local genius* tidak hanya dipahami sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sumber nilai yang dapat membentuk karakter dan orientasi kepemimpinan bangsa. Kearifan lokal mengandung nilai kebijaksanaan, moralitas, solidaritas, serta tanggung jawab sosial yang relevan dalam menghadapi tantangan kepemimpinan modern.¹

Konsep *local genius* memiliki peran penting dalam membangun kepemimpinan yang berakar pada identitas bangsa. Berbagai tradisi kepemimpinan lokal di Indonesia, seperti falsafah *Hastabrata* dalam budaya Jawa, prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* dalam masyarakat Minangkabau, maupun nilai-nilai kepemimpinan Sunda yang menekankan harmoni dan keseimbangan sosial, menunjukkan bahwa kepemimpinan ideal tidak hanya bertumpu pada kekuasaan formal, tetapi juga pada legitimasi moral dan kedekatan dengan masyarakat.² Nilai-nilai tersebut menjadi modal sosial yang memperkuat hubungan antara pemimpin dan rakyat serta menciptakan kepemimpinan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hal ini memungkinkan karena di dalam menjalankan pemerintahannya kebijakan yang dikeluarkan sering dipengaruhi oleh pemikiran pemimpin maupun lingkungan pendukungnya. Tentunya ini rentan karena pemimpin menjadi seorang yang terkultuskan. Ditinjau dari sudut budaya dan historis, bangsa Indonesia memiliki kekhasan dalam menentukan jalannya sejarah. Di mana kalau dicermati, masyarakat Indonesia pada umumnya menganut kepatuhan kepada pemimpin serta selalu berusaha menjaga hubungan yang harmonis dengan komunitas sekitarnya. Salah satu penyebab dari cara berfikir tersebut karena timbulnya ikatan komunal yang kuat pada masyarakat.

Di tengah arus globalisasi dan modernisasi politik, kepemimpinan nasional sering menghadapi tantangan berupa krisis etika, menurunnya kepercayaan publik, serta

¹ Sartini, "Menggalai Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafati," *Jurnal Filsafat* 14, no. 2 (2004): 111–120, <https://doi.org/10.22146/jf.33910>.

² Yeni Mulati dan Eny Purwandari, "Satria Piningit: The Concept of Leadership Based on Javanese Local Wisdom," *El Harakah: Jurnal Budaya Islam* 25, no. 1 (2023): 113–136, <https://doi.org/10.18860/eh.v25i1.20826>

semakin kompleksnya persoalan sosial. Dalam situasi tersebut, *local genius* dapat menjadi sumber inspirasi untuk membangun model kepemimpinan yang berorientasi pada integritas, kebersamaan, dan keberlanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal mampu memperkuat kualitas kepemimpinan dan meningkatkan efektivitas organisasi melalui penguatan karakter, budaya kerja, serta tanggung jawab sosial.³ Oleh karena itu, pengintegrasian kearifan lokal ke dalam sistem kepemimpinan nasional menjadi penting untuk menciptakan pemimpin yang tidak hanya kompeten secara administratif, tetapi juga memiliki sensitivitas budaya dan moral.

Nilai musyawarah yang berkembang dalam berbagai komunitas adat, misalnya, menjadi salah satu landasan utama dalam sistem demokrasi Indonesia yang diwujudkan melalui sila keempat Pancasila. Gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia telah lama menjadi dasar pembangunan nasional dan penguatan solidaritas sosial.⁴ Perkembangan globalisasi, modernisasi, dan digitalisasi membawa tantangan baru terhadap eksistensi nilai-nilai lokal. Kepemimpinan modern sering kali lebih berorientasi pada efisiensi, kompetisi, dan rasionalitas administratif sehingga berpotensi mengabaikan nilai-nilai budaya lokal yang sebenarnya memiliki relevansi tinggi dalam pembangunan bangsa.⁵ Kajian mengenai *local genius* dalam kepemimpinan nasional menjadi relevan untuk memahami bagaimana nilai-nilai budaya lokal dapat berkontribusi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga sebagai fondasi etis yang mampu memperkuat kualitas kepemimpinan nasional di tengah dinamika perubahan global.⁶

Selain memiliki dimensi budaya, *local genius* juga mempunyai dimensi strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan suatu sistem kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh kesesuaiannya dengan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Kepemimpinan yang mengabaikan konteks budaya sering kali menghadapi hambatan dalam implementasi kebijakan karena kurang memperoleh dukungan publik. Sebaliknya, kepemimpinan yang mengintegrasikan nilai lokal cenderung lebih adaptif dan berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara merupakan kristalisasi nilai-nilai kearifan lokal Nusantara. Nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial telah hidup dalam masyarakat jauh sebelum kemerdekaan. Di tengah tantangan global seperti polarisasi politik, krisis kepercayaan publik, dan ketimpangan sosial, diperlukan kepemimpinan yang menggabungkan kompetensi modern dengan kebijaksanaan lokal.

³ Pieter Sahertian, Umiati Jawas, dan David Sukardi Kodrat, "Pengembangan Kualitas dan Keunggulan Kepemimpinan dalam Organisasi: Peran Moderasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal," *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 18, no. 2 (2022): 149–168, <https://doi.org/10.21067/jem.v18i2.7314>

⁴ Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid I, (Jakarta: Panitia Penerbit, 1963), 618.

⁵ Wasistiono Sadu, *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*, (Bandung: Fokusmedia, 2014), 52.

⁶ Ahmadi Ahmadi et al., "Integrating Mangenta Local Wisdom into Pesantren Leadership: An Empirical Model of Educational Transformation," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 14, no. 1 (2025): 394, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v14i1.2382>

Konsep *Local Genius*

Local genius adalah kemampuan budaya lokal dalam mempertahankan identitasnya di tengah pengaruh budaya luar.⁷ Dalam konteks Indonesia, konsep ini tercermin dalam nilai gotong royong, musyawarah, toleransi, dan penghormatan terhadap alam serta sesama manusia. Konsep *local genius* dalam kebudayaan Indonesia merujuk pada kemampuan suatu masyarakat lokal dalam mempertahankan identitas budayanya sekaligus beradaptasi terhadap pengaruh budaya luar tanpa kehilangan jati diri. Dalam perspektif antropologi budaya, *local genius* bukan hanya sekadar tradisi atau warisan masa lalu, tetapi merupakan sistem nilai yang hidup, dinamis, dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman.⁸ Dengan demikian, *local genius* dapat dipahami sebagai mekanisme kultural yang memungkinkan masyarakat Indonesia tetap eksis di tengah arus perubahan global yang sangat cepat.

Negara Indonesia yang multikultural, menjadikan *local genius* muncul dalam berbagai bentuk sistem sosial dan kelembagaan adat. Misalnya, sistem *nagari* di Minangkabau yang mengatur kehidupan sosial berbasis musyawarah dan kekerabatan, sistem *subak* di Bali yang mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, dan ekologis dalam pengelolaan irigasi, serta sistem *gotong royong* di Jawa yang menekankan solidaritas kolektif dalam kehidupan bermasyarakat.⁹ Setiap bentuk tersebut menunjukkan bahwa *local genius* tidak berdiri sendiri, tetapi melekat dalam struktur sosial masyarakat sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan antarindividu, komunitas, dan lingkungan.

Masyarakat Indonesia menurut Furnivall dalam Nasikun merupakan masyarakat majemuk (*plural societies*), yakni suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik.¹⁰ Sementara Clifford Geertz mengemukakan bahwa masyarakat majemuk adalah merupakan masyarakat yang terbagi-bagi ke dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri, dalam mana masing-masing sub sistem terikat ke dalam oleh ikatan-ikatan yang bersifat *primordial*.¹¹

Sejak zaman nenek moyang kita sudah memiliki sistem budaya yang bersumber dari sistem kebudayaan yang mendasarkan kehidupan masyarakat pada suatu keyakinan bahwa kehidupan manusia tergantung pada alam. Dalam hubungannya dengan konsep kekuasaan, adanya kepercayaan bahwa sosok individu yang dipandang patut memimpin adalah seorang yang mampu mempunyai kekuatan untuk menguasai alam dan mengatur alam.

Pandangan ini terus bertahan dan tidak berubah meskipun telah datang pengaruh agama Hindu, Budha dan Islam. Masuknya agama Hindu dan Budha dengan memperkenalkan dewa-dewa yang mengatur alam yang menambah suatu pandangan

⁷ H. G. Quaritch Wales, *The Making of Greater India: A Study in South-East Asian Culture Change*, (London: Bernard Quaritch Ltd., 1951), 9.

⁸ Wales, *The Making of Greater India*, 10.

⁹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1985), 60.

¹⁰ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 33.

¹¹ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, 38

baru yaitu konsepsi kosmologis. Menurut Heine Galbern konsepsi ini menggambarkan adanya kepercayaan tentang harmoni dan keselarasan antara makrokosmos dengan mikrokosmos yaitu antara alam semesta (jagat raya) dengan dunia manusia.¹² Untuk mewujudkan harmoni itu maka kerajaan dianggap sebagai jagat raya dalam bentuk dan raja dianggap perwujudan dari dewa.

Kepercayaan ini menjadi landasan kekuasaan yang mendudukkan raja di atas segala-galanya. Ironisnya lagi, yang berhak menggantikan raja hanya orang-orang yang mempunyai ikatan darah dengan raja dan orang-orang yang mendapat mandat langsung dari raja. Rakyat hanya sebagai orang-orang yang wajib menjunjung keputusan raja. Datangnya Islam menambah deretan persyaratan legitimasi kekuasaan yaitu dengan menghubungkan silsilah kerajaan dengan nabi. Hal muncul karena nabi dianggap sebagai wakil Tuhan yang ditugaskan menyelaraskan harmoni antara makrokosmos dengan mikrokosmos. Namun Islam dalam hal ini memberi nuansa baru bagi masyarakat, misalnya lebih membebaskan akan keterikatan feodalisme dan menawarkan suasana lebih terbuka misalnya dalam hal musyawarah.

Dengan demikian *local genius* masyarakat Indonesia secara umum bersumber dari sistem kepercayaan yang mempengaruhi perilaku interaksi antara pemimpin dengan yang dipimpin. Namun tentunya kekentalan antara satu dengan daerah lainnya di Indonesia tidak sama. Hal ini disebabkan selain budaya yang berbeda juga karena adanya suatu proses sosial untuk memelihara dan menjaga hal tersebut berbeda antara suatu daerah dengan daerah lainnya.

Secara teoritis, *local genius* memiliki empat karakteristik utama. Pertama, bersifat adaptif, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa kehilangan esensi budaya. Kedua, bersifat selektif, yakni mampu menyaring pengaruh luar dan hanya menerima unsur yang sesuai dengan nilai lokal. Ketiga, bersifat integratif, yaitu mampu menggabungkan unsur baru dengan sistem nilai yang sudah ada. Keempat, bersifat dinamis, yaitu terus berkembang mengikuti perubahan sosial, ekonomi, dan politik.¹³ Keempat karakteristik ini menunjukkan bahwa *local genius* bukan entitas statis, melainkan sistem budaya yang aktif dan produktif dalam membentuk identitas masyarakat Indonesia.

Selain itu, *local genius* juga memiliki fungsi ekologis yang penting. Banyak komunitas adat di Indonesia memiliki sistem pengetahuan tradisional dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Misalnya, aturan adat tentang hutan larangan di berbagai daerah berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah eksploitasi berlebihan terhadap alam. Hal ini menunjukkan bahwa *local genius* tidak hanya berorientasi pada aspek sosial, tetapi juga memiliki dimensi lingkungan yang sangat relevan dengan isu keberlanjutan (*sustainability*) dalam pembangunan modern.¹⁴

¹² Robert Heine Gerdern, *Konsepsi Tentang Negara dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara*, terjemahan Deliar noer, (Jakarta: Rajawali, 1982), 1.

¹³ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 146.

¹⁴ Clifford Geertz, *The Interpretation of Cultures*, (New York: Basic Books, 1973), 89.

Dalam perkembangan kontemporer, *local genius* menghadapi tantangan serius akibat globalisasi dan modernisasi. Arus budaya global yang dominan sering kali menyebabkan terjadinya erosi nilai-nilai lokal, terutama di kalangan generasi muda. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi *local genius* justru menjadi strategi penting dalam memperkuat identitas nasional dan membangun ketahanan budaya bangsa.¹⁵ Oleh karena itu, *local genius* tidak hanya perlu dilestarikan, tetapi juga diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan, kebijakan publik, dan praktik kepemimpinan nasional.

Dengan demikian, *local genius* dalam kebudayaan Indonesia dapat dipahami sebagai fondasi kultural yang tidak hanya membentuk identitas masyarakat, tetapi juga menjadi sumber nilai dalam pembangunan nasional. Keberadaannya memberikan landasan etis, sosial, dan ekologis yang kuat bagi terciptanya masyarakat yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berakar pada budaya sendiri

Local Genius sebagai Dasar Kepemimpinan Nasional

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang yaitu pemimpin atau *leader* untuk mempengaruhi orang lain yaitu yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya. Sedangkan Ordway Tead dalam Kartono menyebutkan bahwa kepemimpinan itu adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan¹⁶ Kepemimpinan merupakan hasil organisasi sosial yang telah terbentuk atau sebagai hasil dinamika interaksi sosial. Kalau kita lihat sejarah, kepemimpinan itu muncul bersama-sama adanya peradaban manusia yaitu sejak manusia berkumpul bersama, lalu bekerja bersama-sama untuk mempertahankan eksistensi hidupnya.

Perkembangan zaman dalam kepemimpinan itu secara ilmiah kemudian berkembang, bersamaan dengan perkembangan ilmu. Kepemimpinan tidak lagi didasarkan pada bakat dan pengalaman saja, tetapi perlu penyiapan secara terencana dan penggemblengan secara sistematis untuk membangkitkan sifat-sifat pemimpin yang unggul dan berhasil. Nilai kepemimpinan tidak lagi hanya ditentukan oleh bakat alamnya akan tetapi oleh kemampuannya menggerakkan banyak orang melakukan suatu karya bersama, berkat kepemimpinannya yang diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan.

Nilai musyawarah merupakan inti dari pengambilan keputusan dalam masyarakat tradisional Indonesia. Prinsip ini sejalan dengan demokrasi deliberatif yang menekankan partisipasi dan konsensus.¹⁷ Sementara itu, gotong royong menjadi fondasi solidaritas sosial dalam pembangunan nasional. *Local genius* memiliki posisi strategis sebagai fondasi kultural dalam pembentukan kepemimpinan nasional Indonesia. Dalam konteks negara yang majemuk seperti Indonesia, kepemimpinan tidak dapat hanya bertumpu pada pendekatan rasional-birokratis, tetapi juga harus berakar pada nilai-nilai budaya yang hidup dalam

¹⁵ I Wayan Ardika, *Warisan Budaya dan Identitas Bangsa*, (Denpasar: Udayana University Press, 2015), 112.

¹⁶ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal itu*, (Jakarta: Rajawali Press 2014), 57.

¹⁷ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1966), 24.

masyarakat. Hal ini disebabkan karena legitimasi kepemimpinan dalam masyarakat Indonesia tidak hanya ditentukan oleh aspek legal-formal, tetapi juga oleh penerimaan sosial dan kesesuaian dengan nilai-nilai kultural yang telah mengakar.¹⁸

Oleh karena itu, *local genius* menjadi sumber nilai yang sangat penting dalam membangun model kepemimpinan yang kontekstual dan berkelanjutan. Secara konseptual, *local genius* berfungsi sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan antara pemimpin dan masyarakat. Dalam banyak komunitas tradisional di Indonesia, pemimpin tidak diposisikan sebagai figur yang dominan secara absolut, tetapi sebagai bagian dari komunitas yang memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakat. Model ini terlihat dalam struktur kepemimpinan adat yang mengedepankan musyawarah sebagai mekanisme utama pengambilan keputusan. Kepemimpinan nasional dapat mengambil pelajaran bahwa kekuasaan bukanlah alat dominasi, melainkan sarana pelayanan publik.

Nilai musyawarah sebagai bagian dari *local genius* memiliki relevansi langsung dengan sistem demokrasi Indonesia. Musyawarah mengajarkan pentingnya dialog, kesetaraan partisipasi, dan pencapaian konsensus dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif yang menekankan keterlibatan publik secara aktif dalam proses kebijakan.¹⁹ Sehingga *local genius* memberikan dasar normatif bagi penguatan demokrasi substantif di Indonesia, bukan hanya demokrasi prosedural.

Selain itu, *local genius* juga menekankan pentingnya solidaritas sosial dalam kepemimpinan. Konsep gotong royong, misalnya, mencerminkan nilai kolektivitas yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Dalam konteks kepemimpinan nasional, gotong royong dapat diterjemahkan sebagai model kolaborasi antara negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam pembangunan nasional.²⁰ Pendekatan ini memperkuat prinsip *shared governance* yang semakin relevan dalam tata kelola modern.

Lebih jauh, *local genius* juga berperan dalam membentuk etika kepemimpinan. Dalam banyak tradisi lokal, pemimpin ideal adalah sosok yang memiliki integritas, kebijaksanaan, dan keteladanan moral. Nilai ini tercermin dalam berbagai ungkapan budaya seperti *ing ngarso sung tulodo* dalam budaya Jawa yang menekankan pentingnya keteladanan seorang pemimpin.²¹ Dalam konteks kepemimpinan nasional, nilai ini menjadi sangat penting untuk membangun kepercayaan publik yang sering kali mengalami krisis akibat praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dengan demikian, *local genius* tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai sistem etika dan tata nilai yang dapat memperkuat kualitas kepemimpinan nasional. Integrasi nilai-nilai lokal ke dalam sistem kepemimpinan modern memungkinkan terciptanya model kepemimpinan yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan kepemimpinan nasional Indonesia tidak dapat dilepaskan dari akar budaya yang menjadi identitas bangsa.

¹⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 146.

¹⁹ Jürgen Habermas, *Between Facts and Norms*, (Cambridge: MIT Press, 1996), 304.

²⁰ Robert D. Putnam, *Making Democracy Work*, (Princeton: Princeton University Press, 1993), 163.

²¹ Ki Hadjar Dewantara, *Karya Ki Hadjar Dewantara*, (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 1977), 28.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan penelitian terdahulu mengenai *local genius* dan kepemimpinan nasional. Penelitian pustaka merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema penelitian.²²

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, membaca, dan mengklasifikasikan berbagai sumber yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk menginterpretasikan makna dan hubungan antara nilai-nilai *local genius* dengan praktik kepemimpinan nasional Indonesia.²³

Hasil dan Pembahasan

1. Pada Era Soekarno Gotong Royong Menopang Demokrasi Terpimpin

Soekarno merupakan seorang tokoh jenius yang mampu mempersatukan dan mengakomodasikan kepentingan dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Pada masa peralihan memang dibutuhkan sosok pemimpin yang bisa menyatukan pandangan untuk tercapainya tujuan bersama. Salah satu pengaruh yang diberikan Soekarno pada masa kepemimpinannya adalah terkait demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan yang diinginkan Soekarno yang tujuannya agar pemerintahan yang dijalankan tidak mengadopsi cara pemerintahan dari negara lain.

Soekarno menginginkan agar sistem pemerintahan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat, yang disatukan dengan kepemimpinan, yang mana apabila dua konsep tersebut digabungkan maka tidak ada pemaksaan kehendak mayoritas atas minoritas seperti sistem pemerintahan negara lain. Mengenai demokrasi terpimpin, Soekarno menyatakan “pimpinannya harus orang yang revolusioner, yang suka kepada revolusi. Sebab, kalau pimpinannya bukan orang yang revolusioner, maka revolusi akan mandek ditengah jalan.”²⁴

Mulai pertengahan tahun 1959 presiden Soekarno mencanangkan suatu model demokrasi yaitu demokrasi terpimpin, hal ini dikarenakan menurut Soekarno demokrasi liberal tidak relevan dengan perkembangan politik yang ada, tidak mendorong tujuan revolusi, mencapai masyarakat adil dan makmur. Soekarno berpandangan, demokrasi liberal bahkan telah meracuni kesadaran social, melahirkan individualisme yang merusak persatuan dan merupakan musuh besar

²² Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), 3.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 248.

²⁴ Soegiarsi Soerojo, *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai*, (Jakarta: PT. Rola Sinar Perkasa, 1988), 110.

jiwa keadilan social. Lebih jauh Soekarno menjelaskan bahwa demokrasi terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, tanpa anarki liberalisme, tanpa otokrasi diktator.²⁵

Demokrasi terpimpin yang diterapkan situasi bukannya menjadi lebih baik, malah memperparah kondisi pada semua sektor kehidupan terutama sektor ekonomi. Stabilitas Negara tidak terkendali dengan baik, maka boleh dikatakan demokrasi terpimpin tidak mampu mewujudkan keamanan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Soekarno melihat bahwa untuk dapat diterima masyarakat sebagai pemimpin juga menggunakan cara dan budaya Jawa dalam melegitimasi kekuasaan. Diantara yang digunakan seperti mengambil filosofi bahwa pemimpin itu harus memiliki kesempurnaan dan kelebihan dibanding dengan orang lain. Dengan demikian soekarno menjadi seorang tokoh rasionalis dan kharismatik. Semangat kolektivisme yang terkandung dalam gotong royong dianggap mampu memperkuat solidaritas nasional dalam menghadapi tantangan pascakolonial dan tekanan internasional pada masa Perang Dingin.²⁶

Melalui Demokrasi Terpimpin, Soekarno berusaha menciptakan integrasi nasional dengan mengakomodasi berbagai kekuatan politik dalam konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme). Konsep tersebut mencerminkan upaya memadukan keragaman ideologi yang berkembang di Indonesia ke dalam satu kerangka persatuan nasional.²⁷ Meskipun dalam praktiknya Demokrasi Terpimpin menuai berbagai kritik karena meningkatnya sentralisasi kekuasaan, gagasan dasarnya menunjukkan bagaimana local genius berupa gotong royong, musyawarah, dan semangat kolektivitas dijadikan fondasi bagi pembangunan bangsa.

Era kepemimpinan Soekarno sebenarnya tidak lepas dari pengaruh tokoh-tokoh lain seperti Hatta, Syahrir dan lain sebagainya. Sistem pemerintahan Indonesia pun mengalami perubahan erka-kali sebagai salah satu usaha untuk mempertahankan kemerdekaan. Hal ini memberi dampak pada kondisi politik yang tidak stabil yang ditandai dengan sering jatuh bangunnya parlemen. Hal ini berakibat pada menonjolnya kembali peran Soekarno sebagai figur pemimpin. Dia mampu menguatkan kembali kekuasaannya dengan membubarkan parlemen dan merubah sistem negara menjadi sistem demokrasi terpimpin yang menjadikan dirinya sebagai pusat kekuasaan. Kemampuan Soekarno dan dukungan yang diberikan kepadanya membuktikan bahwa kedudukan dan peran Soekarno sebagai seorang yang genius dan seorang kharismatik mampu menentukan pola dan arah kepemimpinan nasional.

Pada era pemerintahan Soekarno, konsep *local genius* atau kearifan lokal memperoleh tempat yang penting dalam pembangunan identitas nasional Indonesia. Local genius dapat dipahami sebagai kemampuan suatu masyarakat untuk menyerap,

²⁵ Hasyimi, *Pendidikan Pancasila*, (Padang: hayfa Press, 2011), 127.

²⁶ Nazwa Akhaza Hani, Muhammad Farhan, dan Ahmad Rizky Pratama, "Transformasi Sistem Ekonomi Sosial Indonesia 1945–1960: Dari Kekacauan Kolonial Menuju Kemandirian Berbasis Gotong Royong," *Journal of Golden Generation Abdimas* 2, no. 1 (2025): 35–37, <https://doi.org/10.65244/jgga.v2i1.302>.

²⁷ M. C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c. 1200*, 4th ed. (Stanford, CA: Stanford University Press, 2008), 327–331.

mengolah, dan menyesuaikan pengaruh luar berdasarkan nilai-nilai budaya yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat tersebut. Dalam konteks Indonesia pascakemerdekaan, Soekarno memanfaatkan nilai-nilai lokal, terutama semangat gotong royong dan rasa kebangsaan, sebagai landasan ideologis untuk memperkuat persatuan bangsa yang terdiri atas beragam suku, agama, bahasa, dan budaya.

Berdasarkan perspektif teori *cultural leadership* (kepemimpinan kultural), yang menjelaskan bahwa seorang pemimpin tidak hanya menjalankan fungsi administratif dan politik, tetapi juga berperan sebagai pembentuk, penjaga, serta penggerak nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Kepemimpinan kultural menekankan kemampuan pemimpin dalam mengartikulasikan simbol, tradisi, norma, dan identitas kolektif untuk menciptakan legitimasi serta solidaritas sosial di tengah masyarakat yang beragam.²⁸

Salah satu bentuk nyata *local genius* pada masa Soekarno terlihat dalam penekanannya terhadap prinsip gotong royong. Bagi Soekarno Pancasila dapat diperas menjadi satu prinsip utama, yaitu gotong royong.²⁹ Konsep gotong royong pada masa pemerintahan Soekarno menjadi salah satu fondasi utama dalam pelaksanaan Demokrasi Terpimpin. Soekarno menilai bahwa sistem demokrasi parlementer yang diterapkan sebelumnya telah menyebabkan fragmentasi politik akibat persaingan partai yang berlebihan. Oleh karena itu, ia menawarkan konsep Demokrasi Terpimpin yang berlandaskan musyawarah dan gotong royong sebagai ciri khas demokrasi Indonesia³⁰ Dalam praktiknya, konsep gotong royong digunakan Soekarno untuk membangun sistem politik yang mengakomodasi berbagai kekuatan sosial dan politik.³¹

Selain gotong royong, *local genius* pada masa Soekarno juga tampak dalam pengembangan nasionalisme revolusioner. Nasionalisme yang dimaksud bukanlah nasionalisme sempit yang menonjolkan superioritas bangsa tertentu, melainkan nasionalisme yang bertujuan membebaskan rakyat dari kolonialisme, imperialisme, dan berbagai bentuk penindasan.³² Integrasi nilai gotong royong dan nasionalisme revolusioner kemudian diwujudkan dalam konsep Demokrasi Terpimpin yang mulai diterapkan secara resmi pada tahun 1959 setelah keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Demokrasi Terpimpin yang diklaim berakar pada tradisi musyawarah dan mufakat dalam budaya Indonesia.³³

²⁸ Joanne B. Ciulla, *Ethics, the Heart of Leadership*, 3rd ed., (Santa Barbara, CA: Praeger, 2014), 112-118.

²⁹ Soekarno, *Lahirnya Pancasila: Kumpulan Pidato BPUPKI*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995), 76-77.

³⁰ Gili Argenti, "Pemikiran Politik Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin," *Jurnal Politikom Indonesiana* 2, no. 2 (2017): 18-19, <https://doi.org/10.35706/jpi.v2i2.960>

³¹ Himawan Indrajat, "Demokrasi Terpimpin Sebuah Konsepsi Pemikiran Soekarno tentang Demokrasi," *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya* 18, no. 1 (2016): 67-69, <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v18i1.72>.

³² Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jilid I, (Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1963), 24-30.

³³ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1962), 580-586.

Sehingga, dalam teori *cultural leadership*, Soekarno dapat dipandang sebagai pemimpin yang berhasil mengangkat *local genius* berupa gotong royong, musyawarah, dan nasionalisme revolusioner menjadi instrumen pemersatu bangsa. Melalui kepemimpinan kulturalnya, nilai-nilai budaya lokal tidak hanya dipertahankan sebagai tradisi masyarakat, tetapi juga diintegrasikan ke dalam ideologi negara dan sistem politik untuk memperkuat identitas nasional Indonesia. Gotong royong pada era Soekarno memiliki peran penting dalam menopang Demokrasi Terpimpin, baik sebagai nilai budaya maupun instrumen politik, meskipun penerapannya menunjukkan kecenderungan menuju sentralisasi kekuasaan negara.³⁴

Soekarno mengonstruksikan Demokrasi Terpimpin sebagai bentuk demokrasi yang sesuai dengan tradisi Indonesia, yaitu mengutamakan musyawarah dan kepemimpinan kolektif yang berorientasi pada kepentingan bersama.³⁵ Namun, dalam implementasinya, konsep tersebut justru memperkuat sentralisasi kekuasaan sehingga ruang kritik dan oposisi menjadi semakin terbatas. Dengan demikian, *local genius* pada era Soekarno tampil dalam bentuk penguatan nilai gotong royong dan nasionalisme revolusioner yang terintegrasi dalam Demokrasi Terpimpin. Melalui pendekatan tersebut, Soekarno berupaya membangun identitas nasional yang berakar pada budaya Indonesia sekaligus menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan politik, sosial, dan ideologis yang dihadapi negara yang baru merdeka.

2. Pada Era Soeharto, *Local Genius* Menopang Stabilitas Politik, Pembangunan Ekonomi, dan Harmoni Sosial

Pada awal kepemimpinan Soeharto, dia berupaya untuk memperbaiki kondisi dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Upaya ini memberikan pengaruh dan perubahan atas usaha peningkatan nasib bangsa dalam berbagai bidang yang dilakukan. Namun dalam perkembangannya program-program yang dibuat, ada pandangan bahwa program-program tersebut bukan lagi banyak diperuntukkan kepada rakyat melainkan demi kekuasaan.

Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan sering dipilih dari kalangan militer, khususnya yang dekat dengan cendana. Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan tujuan, bisa tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan ditopang kekuatan Golkar, TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan kapital internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem politik dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi.³⁶

³⁴ Lila Pelita Hati dan Lestari Dara Cinta Utami Ginting, "Segitiga Kekuasaan Demokrasi Terpimpin Tahun 1959–1965: Sukarno, TNI-AD dan Partai Komunis Indonesia," *Yupa: Historical Studies Journal* 6, no. 2 (2022): 231–233, <https://doi.org/10.30872/yupa.v6i2.1051>.

³⁵ Gili Argenti, "Pemikiran Politik Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin," 21–22.

³⁶ Iskandar Syah, *Sejarah Nasional Indonesia*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2016), 184.

Era pemerintahan Soeharto sering dikaitkan dengan keberhasilan menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Salah satu faktor yang turut mendukung keberhasilan tersebut adalah keberadaan *local genius* atau kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Indonesia.³⁷ *Local genius* berperan sebagai modal sosial yang menopang integrasi nasional dan memperkuat stabilitas politik yang dibutuhkan untuk menjalankan pembangunan.³⁸

Teori *Cultural Leadership* memandang bahwa efektivitas kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan administratif atau kekuatan politik, tetapi juga oleh kemampuan pemimpin dalam mengartikulasikan, menginternalisasikan, dan memanfaatkan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber legitimasi dan arah kebijakan. Dalam perspektif ini, pemimpin berfungsi sebagai agen budaya yang menghubungkan tradisi, nilai sosial, dan identitas kolektif dengan tujuan-tujuan politik serta Pembangunan.³⁹

Konsep *local genius* mengalami transformasi yang berbeda dibandingkan masa Soekarno. Jika pada era sebelumnya nilai-nilai lokal digunakan untuk membangun semangat revolusi dan mobilisasi politik, pada masa Soeharto nilai-nilai tersebut lebih diformalisasi sebagai instrumen untuk menciptakan stabilitas politik dan mendukung pembangunan ekonomi. Pemerintah Orde Baru meyakini bahwa keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai dalam situasi politik yang aman, tertib, dan terkendali. Oleh karena itu, berbagai nilai budaya lokal yang dianggap mendukung keteraturan sosial diangkat menjadi bagian dari narasi resmi negara.⁴⁰

Selain menopang stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, *local genius* juga berkontribusi terhadap terciptanya harmoni sosial. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki kemampuan untuk menjaga hubungan antar kelompok masyarakat yang beragam melalui mekanisme toleransi, solidaritas, dan penyelesaian konflik secara damai. Nilai-nilai tersebut membantu masyarakat mempertahankan integrasi sosial di tengah perubahan sosial yang cepat akibat modernisasi dan pembangunan. Dalam konteks Indonesia yang plural, kearifan lokal menjadi instrumen penting dalam menjaga kerukunan antaragama dan antarkelompok sehingga mendukung terciptanya stabilitas sosial yang relatif terjaga selama periode Orde Baru.⁴¹

³⁷ Rosmaida Sinaga, Flores Tanjung, dan Yuri Nasution, "Local Wisdom and National Integration in Indonesia: A Case Study of Inter-Religious Harmony amid Social and Political Upheaval in Bunga Bondar, South Tapanuli," *Journal of Maritime Studies and National Integration* 3, no. 1 (2019): 30–35, <https://doi.org/10.14710/jmsni.v3i1.4482>

³⁸ Budi Rajab, "Otoritarianisme-Birokratik Orde Baru, Krisis Ekonomi dan Politik, dan Demokrasi Formal Masa Reformasi," *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)* 8, no. 1 (2022): 59–78, <https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.21817>.

³⁹ Edgar H. Schein, *Organizational Culture and Leadership*, 4th ed., (San Francisco: Jossey-Bass, 2010), 3–7.

⁴⁰ M. C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since c. 1200*, 4th ed. (Stanford, CA: Stanford University Press, 2008), 372–376.

⁴¹ Sinaga, dkk, "Local Wisdom and National Integration in Indonesia," 33–34.

Berdasarkan teori *cultural leadership*, kepemimpinan Soeharto menunjukkan upaya yang kuat dalam memanfaatkan budaya sebagai instrumen pengelolaan negara. Nilai-nilai seperti harmoni sosial, kerukunan, musyawarah, kekeluargaan, dan penghormatan terhadap otoritas dijadikan landasan normatif untuk membangun stabilitas politik. Nilai-nilai tersebut bukan sekadar warisan budaya yang dibiarkan berkembang secara alami, tetapi direkonstruksi dan diformalkan oleh negara menjadi bagian dari ideologi pembangunan Orde Baru. Soeharto berhasil membangun legitimasi kepemimpinannya dengan menampilkan diri sebagai figur yang mampu menjaga keteraturan sosial sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dipahami masyarakat Indonesia, khususnya budaya Jawa.⁴²

Salah satu bentuk *local genius* yang mendapat penekanan kuat adalah konsep harmoni sosial. Dalam pandangan pemerintah Orde Baru, masyarakat Indonesia memiliki karakter budaya yang menjunjung tinggi keseimbangan, kebersamaan, dan menghindari konflik terbuka. Nilai-nilai tersebut dianggap sesuai dengan kebutuhan negara untuk menjaga persatuan nasional setelah periode pergolakan politik pada akhir masa Demokrasi Terpimpin. Harmoni sosial kemudian dijadikan landasan untuk membangun hubungan antara negara dan masyarakat, dengan menempatkan stabilitas sebagai prasyarat utama pembangunan nasional.⁴³

Pemahaman mengenai harmoni sosial tersebut banyak dipengaruhi oleh tradisi budaya Jawa yang menekankan pentingnya kerukunan (*rukun*), keselarasan, dan penghormatan terhadap otoritas. Sebagai seorang pemimpin yang berasal dari lingkungan budaya Jawa, Soeharto sering kali menampilkan gaya kepemimpinan yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Dalam praktiknya, konflik politik dan perbedaan pendapat tidak dipandang sebagai bagian normal dari demokrasi, melainkan sebagai potensi gangguan terhadap stabilitas nasional. Karena itu, pemerintah berupaya membatasi berbagai bentuk oposisi politik dengan alasan menjaga persatuan dan ketertiban masyarakat.⁴⁴

Dalam bidang ekonomi, pemanfaatan *local genius* terlihat melalui pengembangan konsep pembangunan yang menekankan kerja sama dan partisipasi masyarakat. Pemerintah mengadopsi berbagai istilah yang berakar pada budaya lokal, seperti gotong royong dan kekeluargaan, untuk mendukung program pembangunan di tingkat desa maupun nasional. Nilai-nilai tersebut digunakan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam proyek pembangunan infrastruktur, program pertanian, dan berbagai kebijakan pembangunan lainnya. Namun demikian, partisipasi yang dibangun cenderung bersifat top-down karena arah dan tujuan pembangunan telah ditentukan oleh pemerintah pusat.⁴⁵

⁴² R. William Liddle, *Leadership and Culture in Indonesian Politics*, (Sydney: Allen & Unwin, 1996), 42–47

⁴³ Liddle, *Leadership and Culture*, 42–45.

⁴⁴ Benedict R. O'G. Anderson, *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1990), 53–58.

⁴⁵ Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1988), 274–278.

Keberhasilan Orde Baru dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi selama beberapa dekade sering dikaitkan dengan kemampuannya menjaga stabilitas politik dan sosial. Akan tetapi, sejumlah akademisi menilai bahwa penggunaan nilai-nilai budaya lokal pada masa ini juga berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan. Nilai harmoni sosial dan kepatuhan sering kali dimanfaatkan untuk membatasi ruang kritik serta memperkuat dominasi negara terhadap masyarakat sipil. Akibatnya, *local genius* yang semula merupakan ekspresi kearifan masyarakat berkembang menjadi bagian dari mekanisme kontrol politik negara.⁴⁶

Namun di sisi lain terutama dalam menjalankan roda pemerintahan. Pengawasan dalam proses pembangunan tidak begitu baik dan lemah. Hal ini menyebabkan terjadinya negosiasi-negosiasi antar elit-elit birokrasi dengan para penguasa kelas menengah atas yang menimbulkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.⁴⁷ Akibatnya Negara diwarnai dengan ketimpangan sosial, ekonomi dan ketidakadilan. Kekuasaan orde baru semakin sulit dikontrol, krisis ekonomi terjadi, krisis kepercayaan meningkat pada krisis politik sebagai akumulasi politik atas kepemimpinan Soeharto. Kondisi ini memberikan ruang terhadap generasi muda terutama mahasiswa mengadakan gerakan menuntut diadakannya reformasi untuk mengembalikan dan menata kembali tatanan Negara demokrasi. Gerakan ini pada akhirnya berhasil menurunkan Soeharto dari puncak kepemimpinan nasional.

Perlu diakui bahwa pemanfaatan *local genius* pada masa Soeharto juga memiliki keterbatasan. Dalam beberapa kasus, negara cenderung menginstrumentalisasi nilai-nilai lokal untuk memperkuat kontrol politik dan legitimasi kekuasaan. Namun secara keseluruhan, keberadaan kearifan lokal tetap menjadi salah satu fondasi penting yang mendukung stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan harmoni sosial. Oleh karena itu, pengalaman Orde Baru menunjukkan bahwa pembangunan nasional akan lebih efektif apabila mampu bersinergi dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat sebagai sumber modal sosial dan integrasi bangsa.⁴⁸

Dengan demikian, *local genius* pada era Soeharto tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai instrumen ideologis yang mendukung agenda stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Harmoni sosial, budaya kepatuhan, serta semangat gotong royong diinterpretasikan dan diformalkan oleh negara untuk memperkuat integrasi nasional serta memperlancar pelaksanaan program pembangunan. Meskipun pendekatan ini berhasil menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka tertentu, penerapannya juga menimbulkan kritik karena cenderung membatasi partisipasi politik dan kebebasan masyarakat.

⁴⁶ Richard Robison, *Indonesia: The Rise of Capital* (Sydney: Allen & Unwin, 1986), 246–251.

⁴⁷ Hasymi, *Pendidikan Pancasila*, 130.

⁴⁸ Rajab, “Otoritarianisme-Birokratik Orde Baru,” 67–72.

3. Pada Era Reformasi Memfragmentasi *Local Genius* Melalui Desentralisasi Demokratis Indonesia

Setelah keruntuhan rezim orde baru, bangsa Indonesia boleh dikatakan sudah mampu membangun demokrasi yang lebih baik yang ditandai dengan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, walaupun masih belum sempurna secara utuh. Pemilu adalah langkah awal untuk membangun demokrasi yang pada gilirannya dapat memilih pemimpin yang mampu dan sanggup menyelesaikan krisis dan sekaligus membangun integritas bangsa kita. Demokrasi tidak hanya cukup diomongkan dan diskusikan, namun harus dipraktekkan. Untuk mempraktekkan demokrasi, perlu ada landasan etika politik yang kuat. Hal ini penting, karena realisasi demokrasi harus dibarengi dengan praktek etika politik yang benar. Jika tidak maka akan terjadi egoisme kepentingan masing-masing pribadi dan kelompok golongan. Harus diingat bahwa masyarakat kita adalah masyarakat majemuk, beragam budaya, suku, bahasa, agama, keyakinan politik dan sebagainya. Pluralisme merupakan tantangan besar dalam membangun demokrasi.

Era Reformasi yang dimulai sejak 1998 ditandai dengan perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan Indonesia melalui penerapan desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap sentralisasi kekuasaan pada masa Orde Baru serta tuntutan demokratisasi yang menghendaki distribusi kewenangan kepada daerah. Secara normatif, desentralisasi bertujuan memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan akuntabilitas pemerintahan, dan memberikan ruang bagi pengembangan identitas lokal. Namun, dalam praktiknya, desentralisasi juga memunculkan fragmentasi terhadap *local genius* atau kearifan lokal yang sebelumnya berfungsi sebagai perekat sosial dalam kerangka nasional.⁴⁹

Pada masa Orde Baru, berbagai bentuk kearifan lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan solidaritas komunal ditempatkan dalam narasi pembangunan nasional yang relatif seragam. Setelah Reformasi, otonomi daerah mendorong munculnya beragam interpretasi identitas lokal yang sering kali berorientasi pada kepentingan politik daerah. Akibatnya, *local genius* tidak lagi diposisikan sebagai modal sosial nasional, melainkan sebagai instrumen legitimasi politik lokal. Fenomena ini menyebabkan terjadinya diferensiasi kebijakan dan identitas antardaerah yang semakin kuat.⁵⁰

Demokrasi tidak lain adalah proses kebudayaan yang menuntut keyakinan setiap warga Negara untuk saing menghargai, membangun dan memelihara toleransi, kesediaan untuk menerima kebenaran pihak lain. Demokrasi bukan masalah hitam putih tetapi proses dialog. Mewujudkan demokrasi dalam kemajemukan adalah suatu yang mungkin untuk diwujudkan termasuk di Indonesia. Demokrasi adalah

⁴⁹ Pius Sugeng Prasetyo, "Desentralisasi dan Demokratisasi di Desa: Membangun Akuntabilitas Publik Melalui Kultur Lokal," *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 1 (2005): 1–15, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/1572>.

⁵⁰ Yenny Chandra, "Assessing the Impact of Decentralization on the Quality of Indonesian Democracy," *Global Strategis* 18, no. 2 (2024): 409–430, <https://doi.org/10.20473/jgs.18.2.2024.409-430>.

suatu sistem nilai dalam pikiran dan kehidupan tentang bagaimana memandang orang lain dalam kesetaraan, menghargai hak-hak orang lain seperti menghargai hak-hak sendiri, yang memandang negeri ini sebagai tempat kehidupan yang sama bagi setiap warga Negara.⁵¹

Untuk mengupayakan pola kepemimpinan nasional yang ideal berdasarkan prinsip demokrasi, maka perlu adanya suatu konsensus untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Hal ini tentunya sangat erat kaitannya dengan keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki sikap mental, semangat, tekad, dan disiplin nasional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Untuk itu perlu membangkitkan motivasi membangun di kalangan masyarakat. Dalam kepemimpinan yang demokratis tentunya ada beberapa syarat utama yang perlu diperhatikan seperti kepemimpinan itu harus bersumber pada Pancasila, demokratis, adil dan yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan untuk menggali nilai-nilai tradisi untuk kemudian dipadukan dengan nilai-nilai positif dari modernism dalam gaya kepemimpinan nasional.

Kepemimpinan nasional yang dibutuhkan bangsa Indonesia terutama di era ilmu pengetahuan dan teknologi, adalah pemimpin yang dapat mengatasi tantangan global dengan segala permasalahan yang ditimbulkannya. Tegasnya kepemimpinan nasional harus bersumber pada nilai-nilai luhur dan demokrasi Pancasila. Nilai-nilai luhur yang diwariskan baiknya dipadukan dengan nilai-nilai modernisasi yang positif seperti rasional, kritis, efisien-efektif dan berdisiplin.⁵² Kepemimpinan demokratis pada prinsipnya harus berorientasi pada kepentingan rakyat dan dapat memberikan arahan serta bimbingan pada rakyat, kemudian tentunya penekanan terhadap tanggung jawab dan kerja sama yang baik. Kekuatan kepemimpinan demokratis itu bukan hanya terletak pada individu pemimpin tetapi juga terletak pada partisipasi aktif dari setiap warga masyarakat.

Desentralisasi yang diterapkan melalui kebijakan otonomi daerah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong munculnya kembali kearifan lokal dalam ruang publik. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan politik, ekonomi, dan budaya.⁵³ Desentralisasi demokratis juga membuka ruang bagi munculnya elite-elite lokal yang memanfaatkan simbol budaya dan tradisi untuk memperkuat kekuasaan politik. Berbagai studi menunjukkan bahwa politik lokal pasca-Reformasi sering kali didominasi oleh

⁵¹ Achmad Fedyani Saifuddin, *Catatan Reflektif Antropologi Sosial Budaya*, (Institut Antropologi Indonesia, 2011), 165.

⁵² Kartini Kartono, *Pemimpin dan kepemimpinan Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu*, (Jakarta: Rajawali Press 2014), 318.

⁵³ Donald K. Emmerson, *Indonesia Beyond Suharto: Polity, Economy, Society, Transition*, (Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1999), 112–116.

oligarki daerah, dinasti politik, serta kelompok-kelompok elit yang mengklaim representasi budaya lokal.⁵⁴

Pada era Reformasi, pola kepemimpinan Indonesia menunjukkan pergeseran dari model sentralistik ke model yang lebih terbuka dan desentralistik. Berdasarkan teori *cultural leadership*, perubahan ini menandai pergeseran fungsi negara dari “pengendali budaya” menjadi “fasilitator budaya”. Negara tidak lagi mendominasi interpretasi nilai-nilai lokal, tetapi memberikan ruang bagi masyarakat daerah untuk menafsirkan dan mengembangkan *local genius* sesuai konteks sosial masing-masing. Hal ini terlihat dalam kebijakan otonomi daerah yang memungkinkan munculnya berbagai bentuk kepemimpinan lokal berbasis budaya, seperti penggunaan adat dalam pemerintahan lokal, penguatan identitas etnis, serta revitalisasi tradisi masyarakat.⁵⁵

Di sisi lain, era Reformasi juga ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Kebebasan berpendapat, kebebasan pers, serta keterbukaan politik memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Dalam konteks ini, *local genius* muncul dalam bentuk praktik demokrasi lokal seperti musyawarah desa, forum warga, dan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.⁵⁶ Partisipasi ini mencerminkan kembalinya nilai-nilai tradisional Indonesia yang menekankan musyawarah dan kebersamaan, namun dalam kerangka sistem demokrasi modern.

Meskipun demikian, fragmentasi *local genius* pada era Reformasi juga menimbulkan tantangan tersendiri. Tanpa adanya kerangka integrasi nasional yang kuat, nilai-nilai lokal berpotensi berkembang secara terpisah dan bahkan saling bertentangan di antara daerah. Selain itu, tidak semua daerah memiliki kapasitas yang sama dalam mengelola kearifan lokal sebagai sumber pembangunan, sehingga terjadi kesenjangan dalam implementasi desentralisasi budaya.⁵⁷ Dengan demikian, *local genius* pada era Reformasi berada dalam posisi yang dinamis: di satu sisi mengalami revitalisasi melalui demokratisasi dan otonomi daerah, namun di sisi lain menghadapi tantangan fragmentasi dan ketidakseragaman.

Demokratisasi lokal menghasilkan kompetisi identitas yang beragam. Berbagai daerah mengembangkan regulasi dan kebijakan yang menonjolkan karakteristik budaya masing-masing, namun tidak selalu sejalan dengan prinsip integrasi nasional. Kondisi ini menyebabkan *local genius* berkembang secara parsial sesuai kepentingan wilayah tertentu sehingga mengurangi fungsi universalnya sebagai perekat sosial bangsa. Di

⁵⁴ Yustinus Suhardi Ruman, “Desentralisasi, Basis Sosial dan Praktek Kekuasaan Elit Politik di Tingkat Lokal Pasca Penerapan Otonomi Daerah,” *Humaniora* 2, no. 1 (2011): 154–163, <https://doi.org/10.21512/humaniora.v2i1.2943>.

⁵⁵ Vedi R. Hadiz, *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*, (Stanford, CA: Stanford University Press, 2010), 22–27.

⁵⁶ Edward Aspinall and Greg Fealy, eds., *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation* (Singapore: ISEAS Publishing, 2003), 23–28.

⁵⁷ Jamie S. Davidson and David Henley, eds., *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism* (London: Routledge, 2007), 201–205.

beberapa daerah, penguatan identitas lokal bahkan memunculkan eksklusivisme budaya yang berpotensi memperlemah kohesi nasional.⁵⁸

Meskipun demikian, fragmentasi *local genius* bukan berarti hilangnya kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya, desentralisasi memberikan ruang bagi revitalisasi budaya lokal yang sebelumnya kurang memperoleh perhatian dari pemerintah pusat. Era reformasi menunjukkan bahwa demokratisasi dan otonomi daerah memerlukan keseimbangan antara penguatan identitas lokal dan pemeliharaan integrasi nasional agar *local genius* tetap berfungsi sebagai modal sosial bangsa.⁵⁹ Secara keseluruhan, era Reformasi menunjukkan bahwa *local genius* tetap menjadi elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Namun, keberadaannya kini lebih bersifat plural, tersebar, dan bergantung pada dinamika lokal masing-masing daerah. Hal ini mencerminkan perubahan besar dalam hubungan antara negara, budaya, dan masyarakat dalam sistem demokrasi yang lebih terbuka.

Kesimpulan

Local genius merupakan akar kebangsaan Indonesia yang memiliki sistem nilai yang diharapkan bisa berfungsi dan menjaga harmoni sosial dalam kepemimpinan nasional. Kepemimpinan nasional Indonesia harus menempatkan local genius bukan hanya sekedar ornamen budaya melainkan sebagai pondasi etis pelaksanaan dan demokrasi pancasila sebagai rambu konstitusional.

Local genius memiliki peran penting dalam membentuk karakter kepemimpinan nasional Indonesia. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, keteladanan, integritas, dan harmoni sosial menjadi fondasi bagi kepemimpinan yang demokratis dan berkelanjutan. Di tengah tantangan globalisasi, penguatan nilai kearifan lokal menjadi strategi penting untuk menjaga identitas bangsa sekaligus meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional.

Kepemimpinan nasional diharapkan mampu menjawab tantangan global tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya sekaligus memperkuat kepemimpinan nasional. Dengan demikian, kekuatan bangsa Indonesia terletak pada kemampuan menggabungkan unsur-unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh dan fungsional.

Daftar Pustaka

- Addiarrahman, dan YUSDANI. "Local Wisdom and Regional Sustainable Economic Development." Dalam *Proceedings of the Southeast Asia Academic Forum on Sustainable Development*. Paris: Atlantis Press, 2021. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210305.074>. (Atlantis Press)
- Ahmadi, Ahmadi, Abdul Azis, Ajahari, Syuhud, dan Wasehudin. "Integrating Mangenta Local Wisdom into Pesantren Leadership: An Empirical Model of

⁵⁸ Kardin M. Simanjuntak, "Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia," *Jurnal Bina Praja* 7, no. 2 (2015): 111–130, <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130>.

⁵⁹ Firdaus Arifin, "The Role of Administrative Law in Realizing Village Autonomy Based on Local Wisdom," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 2 (2024): 245–261, <https://doi.org/10.56087/ajjih.v27i2.495>.

- Educational Transformation.” *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 14, no. 1 (2025): 393-412, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v14i1.2382>.
- Anderson, Benedict R. O’G. *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1990.
- Ardika, I Wayan. *Warisan Budaya dan Identitas Bangsa*. Denpasar: Udayana University Press, 2015.
- Argenti, Gili. “Pemikiran Politik Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin.” *Jurnal Politikom Indonesiana* 2, no. 2 (2017): 14–25. <https://doi.org/10.35706/jpi.v2i2.960>.
- Arifin, Firdaus. “The Role of Administrative Law in Realizing Village Autonomy Based on Local Wisdom.” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 2 (2024): 245–261. <https://doi.org/10.56087/aijih.v27i2.495>.
- Aspinall, Edward, dan Greg Fealy, eds. *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation*. Singapore: ISEAS Publishing, 2003.
- Azizy, A. Qodri. *Membangun Integritas Bangsa*. Jakarta: Renaisan, 2008.
- Chandra, Yenny. “Assessing the Impact of Decentralization on the Quality of Indonesian Democracy.” *Global Strategis* 18, no. 2 (2024): 409–430. <https://doi.org/10.20473/jgs.18.2.2024.409-430>.
- Crouch, Harold. *The Army and Politics in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1988.
- Davidson, Jamie S., dan David Henley, eds. *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism*. London: Routledge, 2007.
- Dewantara, Ki Hadjar. *Karya Ki Hadjar Dewantara*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa, 1977.
- Emmerson, Donald K. *Indonesia Beyond Suharto: Polity, Economy, Society, Transition*. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1999.
- Feith, Herbert. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1962.
- Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books, 1973.
- Gerdern, Robert Heine. *Konsepsi Tentang Negara dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara*. Diterjemahkan oleh Deliar Noer. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Habermas, Jürgen. *Between Facts and Norms*. Cambridge, MA: MIT Press, 1996.
- Hani, Nazwa Akhaza, Muhammad Farhan, dan Ahmad Rizky Pratama. “Transformasi Sistem Ekonomi Sosial Indonesia 1945–1960: Dari Kekacauan Kolonial Menuju Kemandirian Berbasis Gotong Royong.” *Journal of Golden Generation Abdimas* 2, no. 1 (2025): 31–40. <https://doi.org/10.65244/jgga.v2i1.302>.
- Hasyimi. *Pendidikan Pancasila*. Padang: Hayfa Press, 2011.
- Hati, Lila Pelita, dan Lestari Dara Cinta Utami Ginting. “Segitiga Kekuasaan Demokrasi Terpimpin Tahun 1959–1965: Sukarno, TNI-AD dan Partai Komunis Indonesia.” *Yupa: Historical Studies Journal* 6, no. 2 (2022): 225–239. <https://doi.org/10.30872/yupa.v6i2.1051>.

- Hatta, Mohammad. *Demokrasi Kita*. Jakarta: Pustaka Antara, 1966.
- Indrajat, Himawan. “Demokrasi Terpimpin Sebuah Konsepsi Pemikiran Soekarno tentang Demokrasi.” *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya* 18, no. 1 (2016): 63–74. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v18i1.72>.
- Iskandar Syah. *Sejarah Nasional Indonesia*. Yogyakarta: Suluh Media, 2016.
- Kartono, Kartini. *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1985.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Lepir, Putiyani Rambu, dan Bambang Ismanto. “Kepemimpinan yang Efektif Berbasis Kearifan Lokal.” *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 14, no. 3 (2024): 255–264. <https://doi.org/10.24246/j.js.2024.v14.i3.p255-264>.
- Liddle, R. William. *Leadership and Culture in Indonesian Politics*. Sydney: Allen & Unwin, 1996.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mulati, Yeni, dan Eny Purwandari. “Satria Piningit: The Concept of Leadership Based on Javanese Local Wisdom.” *El Harakah: Jurnal Budaya Islam* 25, no. 1 (2023): 113–136. <https://doi.org/10.18860/eh.v25i1.20826>.
- Nasikun. *Sistem Sosial Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Prasetyo, Pius Sugeng. “Desentralisasi dan Demokratisasi di Desa: Membangun Akuntabilitas Publik Melalui Kultur Lokal.” *Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 1 (2005): 1–15. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JAP/article/view/1572>.
- Prihana, Ednawan, Ngadisah, Muhadam Labolo, dan Kusworo. “Sundanese Culture Local Wisdom Based Leadership: The Dynamics of Government Leadership of Purwakarta Regent Period 2008–2018.” *International Journal of Science and Society* 2, no. 1 (2020): 213–220. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v2i1.71>.
- Putnam, Robert D. *Making Democracy Work*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993.
- Quaritch Wales, H. G. *The Making of Greater India: A Study in South-East Asian Culture Change*. London: Bernard Quaritch Ltd., 1951.
- Rajab, Budi. “Otoritarianisme-Birokratik Orde Baru, Krisis Ekonomi dan Politik, dan Demokrasi Formal Masa Reformasi.” *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics)* 8, no. 1 (2022): 59–78. <https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.21817>. (e-Journal Unair)
- Ricklefs, M. C. *A History of Modern Indonesia Since c. 1200*. 4th ed. Stanford, CA: Stanford University Press, 2008.
- Robison, Richard. *Indonesia: The Rise of Capital*. Sydney: Allen & Unwin, 1986.
- Ruman, Yustinus Suhardi. “Desentralisasi, Basis Sosial dan Praktek Kekuasaan Elit Politik di Tingkat Lokal Pasca Penerapan Otonomi Daerah.” *Humaniora* 2, no. 1 (2011): 154–163. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v2i1.2943>.

- Sadu, Wasistiono. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Fokusmedia, 2014.
- Sahertian, Pieter, Umiati Jawas, dan David Sukardi Kodrat. “Pengembangan Kualitas dan Keunggulan Kepemimpinan dalam Organisasi: Peran Moderasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal.” *Jurnal Ekonomi Modernisasi* 18, no. 2 (2022): 149–168. <https://doi.org/10.21067/jem.v18i2.7314>.
- Saifuddin, Achmad Fedyani. *Catatan Reflektif Antropologi Sosial Budaya*. Jakarta: Institut Antropologi Indonesia, 2011.
- Sartini. “Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafati.” *Jurnal Filsafat* 14, no. 2 (2004): 111–120. <https://doi.org/10.22146/jf.33910>.
- Simanjuntak, Kardin M. “Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia.” *Jurnal Bina Praja* 7, no. 2 (2015): 111–130. <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.111-130>.
- Sinaga, Rosmaida, Flores Tanjung, dan Yuri Nasution. “Local Wisdom and National Integration in Indonesia: A Case Study of Inter-Religious Harmony amid Social and Political Upheaval in Bunga Bondar, South Tapanuli.” *Journal of Maritime Studies and National Integration* 3, no. 1 (2019): 30–35. <https://doi.org/10.14710/jmsni.v3i1.4482>. (Undip E-Journal System Portal)
- Soekarno. *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jilid 1. Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1963.
- Soekarno. *Lahirnya Pancasila: Kumpulan Pidato BPUPKI*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995.
- Soerojo, Soegiarsi. *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai*. Jakarta: PT Rola Sinar Perkasa, 1988.
- Vatikiotis, Michael R. J. *Indonesian Politics under Suharto: Order, Development and Pressure for Change*. London: Routledge, 1998.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.